

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGADAAN BARANG/JASA (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Buleleng)

Ida Ayu Putu Krisna Dewi¹ Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { idaayukrisnadewi0@gmail.com, ayurencana@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasilan panitia, sistem dan prosedur pengadaan, sistem pengendalian intern, kualitas panitia pengadaan, dan etika panitia pengadaan terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian (Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan), dan 1 karyawan dari 21 SKPD di Kabupaten Buleleng Berjumlah 126 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu 126 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program *SPSS 20.0 for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan panitia berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa, sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa, kualitas panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa, dan etika pengadaan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Kata kunci: penghasilan panitia, sistem dan prosedur pengadaan, sistem pengendalian intern, kualitas panitia pengadaan, dan etika pengadaan, dan kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Abstract

This study aims to determine the effect of procurement committee income, procurement systems and procedures, internal control systems, quality of procurement committees, and procurement committee ethics on the tendency of fraudulent procurement of goods/services at SKPD in Buleleng Regency. This research is a quantitative study using primary data obtained from questionnaires given to respondents. The population of this study were all Heads of Offices, Secretaries, Heads of Subdivisions (Heads of General Subdivisions, Heads of Planning Subdivisions, Heads of Finance Subdivisions), and 1 employee from 21 SKPD in Buleleng Regency totaling 126 people. The sampling technique in this study used a saturated sample of 126 respondents. The data analysis technique used is descriptive statistical test, classical assumption test and multiple linear regression analysis using SPSS 20.0 for Windows. The results of this study indicate that the procurement committee has a negative effect on the tendency of fraudulent procurement of goods/services, the procurement system and procedure has a positive effect on the tendency of fraudulent procurement of goods/services, the internal control system has a negative effect on the tendency of fraudulent procurement of goods/services, the quality of the procurement committee has a positive effect on the tendency of fraudulent procurement of goods/services, and procurement ethics have a negative effect on the tendency of fraudulent procurement of goods/services.

Keywords: *committee income, procurement systems and procedures, internal control systems, quality of the procurement committee, and procurement ethics, and the tendency of fraudulent procurement of goods/services*

PENDAHULUAN

Kecurangan ialah sebuah tindakan dengan unsur kebohongan yang dilakukan secara sengaja dimana merugikan korbannya dan hanya menguntungkan pelaku. Beberapa kecurangan terdapat pada sektor publik, termasuk korupsi, asset yang salah penggunaannya (asset misappropriation), ataupun pernyataan yang tidak sesuai fakta (*fraudulent statement*). Suharti dkk, (2015) menegaskan bahwa asal korupsi teramai di bagian keuangan publik ialah pengadaan barang atau jasa. Apabila adanya penyelewengan pada proses pengadaan barang atau jasa, maka hal tersebut terjadi karena mengabaikan prinsip dan etika pengadaan. Hal tersebut diperkuat oleh data dari *Indonesia Procurement Watch* (IPW) di mana itu memperlihatkan 70% kasus korupsi yang ada di Indonesia berupa pelanggaran pengadaan barang atau jasa. Banyaknya kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa tersebut tentunya disebabkan oleh tidak dipenuhinya peraturan pemerintah oleh pihak-pihak yang termasuk sebagai pelaku korupsi pada pengadaan barang atau jasa, akibat dari perilaku curang yang terus-menerus, dan negara selalu menanggung kerugian nasional. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa penyebab terjadinya *fraud* dapat digolongkan yakni faktor perusahaan (luar) dan faktor individu (dalam) (Rencana, 2016). Kasus kecurangan pengadaan barang/jasa yang terjadi di Bali yang dimana pelaku melakukan korupsi alat kesehatan dengan memanipulasi harga. Diduga pihak rekanan pemenang tender membuat skor kontrak tidak sah setelah dipotong pajak 10% mencapai sebesar Rp19,2 miliar. Namun, yang ditransfer ke rekening BRI mencapai Rp12,9 miliar sehingga ada selisih belanja riil ditambah PPN dari skor kontrak mencapai Rp6,28 miliar yang menjadi kerugian negara. Selain itu kasus penipuan juga pernah terjadi di Kabupaten Buleleng yang selalu mengarah pada kasus korupsi. Seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh

10 kepala desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan dana bantuan sosial dari anggaran pemerintah Kabupaten Buleleng (infokorupsi.com, 2010). Kasus penipuan lainnya juga pernah terjadi di beberapa dinas termasuk kasus korupsi tahun 2004 oleh dinas Pekerjaan Umum, dimana tiga orang terdakwa melakukan peningkatan harga pembelian dari alat kerja berat sejumlah Rp. 500.000.000 (Tempo.co, 2008). Kemudian adanya kasus kejanggalan dalam pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng yang mengalami kerugian negara sebesar 10 miliar untuk tiga kabupaten yaitu Denpasar, Buleleng, dan Badung (Nusabali, 2017). Kasus korupsi selanjutnya juga terjadi akibat *mark-up* harga pengadaan lahan pembangunan Kampus Undiksha di Jinang Dalem yang merugikan negara sejumlah 3 milyar (Metrobali.com, 2015).

Dilihat dari fenomena itu kejadian *fraud* sangat sering terjadi pada lingkungan instansi pemerintah satu diantaranya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kasus-kasus tersebut dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran akan perbuatan etis masih tinggi, untuk mengurangi tindakan tersebut maka diperlukan pengendalian terhadap *fraud* tersebut. Secara umum, tindak kecurangan muncul karena adanya motivasi. Dimana teori yang menjelaskan mengenai motivasi tindak kecurangan adalah teori segitiga kecurangan milik Cressey tahun 1953 bahwa kecurangan terjadi karena adanya sebuah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunities*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang diketahui dengan nama *fraud triangle*.

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dimana hasil dari melakukan sesuatu yang berupa imbalan. Rendahnya penghasilan panitia akan menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Ini sesuai dengan gagasan jika penyimpangan pada biasanya mulai muncul karena adanya *anbalance* diantara pendapatan dan kebutuhan hidup yang wajar. Karena disaat kebutuhan hidup

panitia pengadaan yang melebihi penghasilannya maka saat tidak ada pilihan lain panitia pengadaan akan bertindak untuk melakukan korupsi demi menjamin kecukupan kebutuhan mereka. Pada awalnya ketidakbenaran yang hanya berakibat pada sebagian kecil dari kerugian negara akan meningkat dan menjadi pelanggaran yang memiliki akibat dimasa depan yakni kerugian tinggi pada negara Hidayati (2017). Berdasarkan hasil penelitian Herlina (2017) pengasilan panitia memiliki pengaruh secara substansial dan bersifat negatif mengenai kecurangan pengadaan barang/jasa. Studi ini didukung oleh hasil penelitian Aji (2013), terdapat dampak yang bersifat negatif dan substansial penghasilan panitia pengadaan pada kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Berpedoman pada uraian itu, maka bisa diambil keputusan hipotetis penelitian yaitu:

H₁ : Penghasilan Panitia Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Sistem dan prosedur pengadaan akan mempengaruhi keberhasilan pengadaan barang/jasa. Sistem dan prosedur pengadaan yang baik mempunyai ciri khas yaitu transparansi, ekonomi, efisiensi dan ketepatan waktu, serta keadilan. Alasan belum berjalannya sistem pengadaan barang/jasa dengan baik dikarenakan tidak adanya keberlanjutan dan pemantauan atas kepatuhan peraturan dan prosedur pengadaan. Jika sistem dan prosedur pengadaannya sendiri tidak efektif dan transparan, maka ada kecendrungan terjadinya kecurangan. Maka dari itu diperlukannya sistem dan prosedur yang baik untuk menunjang dalam pengadaan barang/jasa. Mengacu pada studi dari Hidayati (2017), bahwa sistem dan prosedur pengadaan berdampak substansial dan negatif mengenai kecurangan pengadaan barang/jasa. Didukung dengan hasil penelitian dari Herlina (2017), dan Nashirotnun (2017) bahwa terdapat pengaruh yang substansial dan mengarah ke negatif mengenai kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotetis penelitian yaitu:

H₂ : Sistem dan Prosedur Pengadaan Berpengaruh Negatif Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Hubungan antara pengendalian intern dengan masalah kecurangan saling berkaitan. Dengan adanya pengendalian intern dalam organisasi dipercaya akan bermanfaat dalam pencegahan *fraud*. manajemen harus melindungi organisasi dari tindakan kecurangan, manajemen juga harus tau apa yang harus dilindungi, dan resiko apa yang akan dihadapi serta menyampaikan resiko tersebut. Pengendalian intern dapat mempengaruhi tindakan *fraud* itu sendiri. Karena jika pengendalian intern suatu organisasi tinggi dan efektif maka akan mengurangi tindak kecurangan itu sendiri. Sebaliknya dengan jika pengendalian intern lemah maka kecenderungan kecurangan pasti meningkat. Menurut penelitian dari Ratnayani (2014) memberikan keputusan sistem pengendalian intern berdampak substansial dan mengarah menuju negatif mengenai *fraud*. Dimana semakin tinggi pengendalian intern maka semakin rendah kecurangan terjadi. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Hidayati (2017), dan Gayatri (2017) yang juga menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotetis penelitian yaitu:

H₃ : Pengendalian Intern Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia pengadaan ialah satu dari sebagian peserta dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dan kegiatan serta keputusannya sangat menentukan proses pengadaan. Kualitas panitia yang dimaksud merupakan kondisi dimana panitia mampu menempatkan dirinya secara profesional dalam konteks yang berhubungan langsung dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungannya. Kompetensi dan profesionalisme yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dan akan memberi dampak keberhasilan sistem pengadaan barang atau jasa untuk menggapai tujuannya. Studi dari Hidayati (2017) yang

menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa berdampak secara substansial dan mengarah pada negatif mengenai *fraud* pengadaan barang/jasa. Hasil studi Hidayati senada dengan studi dari Herlina (2017) dan Nashirotnun (2017) yang menyatakan bahwa kualitas panitia berdampak substansial dan negative pada kecurangan pengadaan barang/jasa.

H₄: Kualitas Panitia Pengadaan Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Etika pengadaan barang/jasa menjadi satu dari sekian aspek yang penting dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang sehat dan adil. Jika ada panitia dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki etika yang kurang maka pengadaan barang/jasa bisa dikatakan tidak sehat dan bisa menjerumuskan ke terjadinya tindakan korupsi. Maka dari itu etika pengadaan sangat perlu diperhatikan untuk menekan tindak kecurangan. Studi dari Hidayati (2017) memberikan keputusan hasil penelitian bahwa etika mempunyai dampak substansial dan mengarah menuju negatif mengenai kecurangan pengadaan barang/jasa. Sejalan dengan itu penelitian dari Setiawan (2020), Indah (2020), dan Herlina (2017) juga menyatakan bahwa etika memiliki pengaruh substansial dan negatif pada kecurangan dalam pengadaan barang/jasa.

H₅: Etika Pengadaan Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dipergunakan pada studi ini. Jenis studi ini adalah penelitian kausal. Hubungan kausal ialah

adanya keterhubungan antara sebab dan akibat. Studi ini memakai data primer sebagai sumber datanya. Data primer ialah data yang didapat oleh pengumpul data secara langsung (Sugiyono 2017). Adapun variabel bebas pada penelitian ini meliputi penghasilan panitia (X_1), sistem dan prosedur pengadaan (X_2), sistem pengendalian intern (X_3), kualitas panitia pengadaan (X_4), dan etika pengadaan (X_5). Sedangkan variabel terikatnya yaitu kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Adapun populasi pada studi ini ialah seluruh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian (Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan), dan 1 karyawan dari 21 SKPD di Kabupaten Buleleng sejumlah 126 orang. Teknik untuk mendapatkan sampel studi ini memakai sampel jenuh yaitu 126 responden. Data pada studi ini dikumpulkan dengan mempergunakan kuesioner sebagai intrumennya. Setelah data terkumpul dilakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dan uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji *t* dan koefisien determinasi dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0 for windows*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan data 126 responden. Setelah data diperoleh kemudian data diuji dengan bantuan program SPSS versi 20.0. dan kemudian dilakukan analisis terhadap hasil uji yang sudah dilakukan. Dibawah ini ialah table dari hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Penghasilan Panitia (X ₁)	12	20	18,08	2,193
Sistem dan Prosedur Pengadaan (X ₂)	30	40	34,35	2,354
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	30	61	48,40	8,399
Kualitas Panitia (X ₄)	12	25	14,74	1,932
Etika Pengadaan (X ₅)	11	20	14,42	2,166
Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Y)	30	45	35,14	3,403

Sumber: Data diolah (2020)

Melihat hasil uji statistik yang ada di tabel 1 bisa terlihat bahwa: (1) Variabel penghasilan panitia (X₁) mempunyai skor terendah 12, skor tertinggi 20, skor rerata (*mean*) 18,08, dan skor standar deviasi sebesar 2,193. (2) Variabel sistem dan prosedur pengadaan (X₂) mempunyai skor terendah 30, skor tertinggi 40, skor rerata (*mean*) 34,35, dan skor standar deviasi sebesar 2,354. (3) Variabel sistem pengendalian intern (X₃) mempunyai skor terendah 30, skor tertinggi 61, skor rerata (*mean*) 48,40, dan skor standar deviasi sebesar 8,399. (4) Variabel kualitas panitia pengadaan (X₄) mempunyai skor terendah 12, skor tertinggi 25, skor rerata (*mean*) 14,74, dan skor standar deviasi sebesar 1,932. (5) Variabel etika pengadaan (X₅) mempunyai skor terendah 11, skor tertinggi 20, skor rerata (*mean*) 14,42, dan skor standar deviasi sebesar 2,166. (6) Variabel

kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y) mempunyai skor terendah 30, skor tertinggi 45, skor rerata (*mean*) 35,14, dan skor standar deviasi sebesar 3,403.

Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan uji kualitas data yakni dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dipakai untuk melihat kevalidan alat ukur. Butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid apabila dilihat dari skor Sig. (2-tailed) < 0,05 maka butir pertanyaan atau indikator itu secara sah valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa butir pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Setelah semua item pernyataan dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsisten atau kestabilan jawaban responden. Suatu pernyataan bisa diputuskan reliable jika skor Cronbach Alpha > 0.70.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Alpha	Keterangan
Penghasilan Panitia (X ₁)	0,829	0,70	Reliabel
Sistem dan Prosedur Pengadaan (X ₂)	0,723	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	0,942	0,70	Reliabel
Kualitas Panitia Pengadaan (X ₄)	0,799	0,70	Reliabel
Etika Pengadaan (X ₅)	0,827	0,70	Reliabel
Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa (Y)	0,717	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian reliabel. Selanjutnya, setelah uji kualitas data terpenuhi maka berlanjut dengan melakukan uji asumsi klasik yang didalamnya berisi uji normalitas, uji

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian normalitas dalam studi ini memakai uji statistik non - parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) dengan syarat skor signifikansi > 0,05 maka dari itu data dapat dikatakan terdistribusi secara normal.

Berikut merupakan hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,81068030
Most Extreme Differences	Absolute	0,072
	Positive	0,072
	Negative	-0,034
Kolmogorov-Smirnov Z		0,807
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,533

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan uji didalam tabel 3 diatas bisa dilihat jika, hasil uji statistik non - parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) didapatkan hasil sebesar (0,533 > 0,05). Hal tersebut membuktikan bahwa data studi ini tersebar secara normal.

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dengan cara melihat skor tolerance dan skor *Variance Inflation Factor* (VIF). Munculnya multikolinieritas bisa dilihat dari skor tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan skor VIF ≥ 0.10 .

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
(X ₁)	0,971	1,029	Tidak ada multikolinieritas
(X ₂)	0,730	1,370	Tidak ada multikolinieritas
(X ₃)	0,994	1,006	Tidak ada multikolinieritas
(X ₄)	0,655	1,527	Tidak ada multikolinieritas
(X ₅)	0,823	1,215	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah (2020)

Merujuk pada tabel 4 menunjukkan bahwa skor tolerance dari variabel penghasilan panitia (X₁) sebesar 0,971, skor tolerance variabel sistem dan prosedur pengadaan (X₂) sebesar 0,73, skor tolerance variabel sistem pengendalian internal (X₃) sebesar 0,994, skor tolerance variabel kualitas panitia pengadaan (X₄) sebesar 0,655, dan skor tolerance variabel etika pengadaan (X₅) sebesar 0,823. Hal tersebut menunjukkan bahwa skor tolerance dari kelima variabel tersebut > 0,10. Kemudian, berdasarkan tabel diatas skor VIF dari variabel penghasilan panitia (X₁) sebesar 1,029, skor VIF variabel sistem dan prosedur pengadaan (X₂) sebesar 1,370, skor VIF

variabel sistem pengendalian internal (X₃) sebanyak 1,006, skor VIF variabel kualitas panitia pengadaan (X₄) sebesar 1,527, dan skor VIF variabel variabel etika pengadaan (X₅) sebesar 1,215. Hal tersebut menunjukkan bahwa skor VIF dari kelima variabel lebih kecil dari 10. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas

Uji heteroskedastisitas pada studi ini dilakukan dengan uji glejser. bilamana skor signifikansi > 0,05 bisa ditarik sebuah keputusan jika model regresi tidak mencirikan heteroskedastisitas. Dibawah ini ialah hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,281	2,910		0,784	0,435
(X ₁)	-0,122	0,073	-0,148	-1,668	0,098
(X ₂)	0,001	0,078	0,001	0,007	0,995
(X ₃)	-0,021	0,019	-0,099	-1,129	0,261
(X ₄)	0,187	0,101	0,201	1,854	0,066
(X ₅)	0,021	0,064	0,032	0,334	0,739

Sumber: Data diolah (2020)

Terlihat pada tabel 5 diatas menunjukkan skor signifikansi pada variabel penghasilan panitia (X₁) yakni 0,098, skor signifikansi dari variabel sistem dan prosedur pengadaan (X₂) sebesar 0,995, skor signifikan dari variabel sistem pengendalian internal (X₃) sebanyak 0,261, skor signifikan dari variabel kualitas panitia pengadaan (X₄) sebesar 0,066, dan skor signifikansi dari variabel etika pengadaan (X₅) sebesar 0,739. Hal tersebut berarti skor signifikansi dari ketiga variabel diatas lebih tinggi dari 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan

bahwa seluruh variabel tidak mencirikan heteroskedastisitas.

Kemudian setelah dilakukam uji asumsi klasik dilanjutkan dengan melakukan uji analisis regresi linear berganda yang yang didalamnya terdapat uji t dan koefisien determinasi. Analisis regresi berganda dipakai agar bisa memperlihatkan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji analisis regresi linear berganda.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23,715	4,741		5,002	0,000
(X ₁)	-0,284	0,119	-0,183	-2,392	0,018
(X ₂)	0,551	0,128	0,381	4,318	0,000
(X ₃)	-0,087	0,031	-0,215	-2,848	0,005
(X ₄)	0,351	0,164	0,199	2,139	0,034
(X ₅)	-0,220	0,105	-0,175	-2,101	0,038

Sumber: Data diolah (2020)

Dilihat dari tabel 6 diatas adapun hasil persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$Y = 23,715 + (-0,284)X_1 + 0,551X_2 + (-0,087)X_3 + 0,351X_4 + (-0,220)X_5 + \epsilon$$

Persamaan regresi yang dirumuskan dapat diinterpretasikan berikut:

1. Konstanta (a) yakni sebanyak 23,715 menunjukkan apabila variabel penghasilan panitia (X₁), sistem dan prosedur pengadaan (X₂), sistem pengendalian internal (X₃), kualitas

panitia (X₄), etika pengadaan (X₅) berskor konstan.

2. Koefisien regresi penghasilan panitia (X₁) sejumlah -0,284 memperlihatkan bahwa setiap adanya penambahan untuk variabel X₁ sebesar 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa akan mengalami penurunan sebesar 0,284.
3. Koefisien regresi sistem dan prosedur pengadaan (X₂) sejumlah 0,551 menunjukkan bahwa setiap ada penambahan variabel X₂ sejumlah 1

satuan, maka kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa akan mengalami kenaikan sebesar 0,273.

4. Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X_3) sebanyak -0,087 menunjukkan bahwa jika ada penambahan variabel X_3 sebanyak 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa akan terjadi penurunan sebesar 0,087.
5. Koefisien regresi kualitas panitia (X_4) sebesar 0,351 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X_4 sebanyak 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa akan mengalami kenaikan sebanyak 0,351.
6. Koefisien regresi etika pengadaan (X_5) sebesar -0,220 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X_5 sebesar 1 satuan, maka kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa akan mengalami penurunan sebesar 0,220.

Uji statistik t dipergunakan untuk memberikan bukti empiris seberapa besar variabel independen masing-masing yang mampu mempengaruhi variabel dependen (Y). Skor signifikan dibawah 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa variabel independen memberikan pengaruh untuk variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik t yang telah dilakukan didapatkan:

1. Hasil yang didapat pada pengujian dari hipotesis pertama variabel penghasilan panitia (X_1) memiliki skor signifikansi sebesar 0,018 yang dibawah dari 0,05. Dilihat dari skor t_{hitung} , sebesar 2,392 > t_{tabel} 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar -0,284. Maka H_1 dalam penelitian ini bisa **diterima**. Jadi, keputusan akhirnya variabel penghasilan panitia (X_1) berdampak negatif dan substansial pada kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y).
2. Hasil yang diperoleh untuk pengujian pada hipotesis kedua variabel sistem dan prosedur pengadaan (X_2) memiliki skor signifikansi sebanyak 0,000 yang dibawah dari 0,05. Dilihat dari skor t_{hitung} , sebesar 4,318 > t_{tabel} 1,65765.

Skor koefisien regresi variabel ini sebesar 0,551. Maka H_2 pada studi ini bisa **ditolak**. Jadi, dapat diambil kesimpulan variabel sistem dan prosedur pengadaan (X_2) berdampak positif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y).

3. Hasil yang didapat pada pengujian untuk hipotesis ketiga variabel sistem pengendalian internal (X_3) memiliki skor signifikansi sebanyak 0,005 yang berada dibawah dari 0,05. Kemudian dilihat dari skor t_{hitung} , sebesar 2,848 > t_{tabel} 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebanyak -0,087. Maka H_3 pada studi ini dapat **diterima**. Jadi, mampu dibuatkan sebuah keputusan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X_3) berdampak negatif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y).
4. Hasil untuk pengujian pada hipotesis keempat variabel kualitas panitia (X_4) memiliki skor signifikansi sebanyak 0,034 yang lebih rendah dari 0,05. Kemudian dari pada itu bisa dilihat dari skor t_{hitung} , sebesar 2,139 > t_{tabel} 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebanyak 0,351. Maka H_4 pada studi ini dapat **ditolak**. Jadi, penarikan kesimpulan studi ini bahwa variabel kualitas panitia (X_4) berdampak positif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y).
5. Hasil untuk pengujian pada hipotesis kelima variabel etika pengadaan (X_5) memiliki skor signifikansi sebesar 0,038 yang lebih rendah dari 0,05. Kemudian bisa dilihat dari skor t_{hitung} , sebesar 2,101 > t_{tabel} 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar -0,220. Maka H_5 pada studi ini dapat **diterima**. Jadi, bisa diputuskan bahwa variabel etika pengadaan (X_5) berdampak negatif dan signifikan mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa (Y).

Uji koefisien determinan (R^2) mengukur kemampuan dari model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Berikut sudah tercantum hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,564	0,318	0,289	2,869

Sumber: Data diolah (2020)

Dilihat dari tabel 7 memperlihatkan jika besarnya skor koefisien determinasi (*adjusted R²*) 0,289 sama dengan 28,9% ini berarti variabel penghasilan panitia, sistem dan prosedur pengadaan, sistem pengendalian intern, kualitas panitia pengadaan, dan etika pengadaan berdampak mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa sebesar 28,9% dan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Pengaruh Penghasilan Panitia terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Dari hasil penelitian variabel penghasilan panitia berpengaruh negatif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan analisis regresi variabel penghasilan panitia memiliki skor signifikansi sebanyak 0,018 yang lebih rendah dari 0,05. Kemudian bisa dilihat pada skor t_{hitung} , sebesar $2,392 > t_{tabel}$ 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar -0,284. Hal ini berarti semakin rendah penghasilan panitia yang diterima maka akan semakin tinggi kecenderungan kecurangan pada pengadaan barang/jasa

Dalam *theory fraud triangle* disebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan adalah tekanan (*pressure*). Tekanan biasanya diidentikkan dengan keadaan keuangan yang bisa terjadi saat seseorang sedang memiliki keuangan yang rendah, dan ketidakpuasan terhadap yang telah diterimanya Rendahnya penghasilan panitia akan menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Sebagian responden menyatakan bahwa

penghasilan mereka tidak sesuai dengan usaha dalam pekerjaan mereka, hal tersebut bisa dikaitkan dengan ketidakpuasan akan penghasilan yang sudah didapatkan, yang tidak menutup kemungkinan panitia pengadaan bisa melakukan tindakan kecurangan.

Studi ini memiliki hasil yang sama dengan Herlina (2017), Aji (2013), dan Mirza (2013) yang menyatakan penghasilan panitia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Sistem dan Prosedur Pengadaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian variabel system dan prosedur pengadaan berdampak positif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan analisis regresi variabel sistem dan prosedur pengadaan memiliki skor signifikansi sebanyak 0,000 dengan posisi lebih rendah dari 0,05. Kemudian bisa dilihat pada skor t_{hitung} , sebesar $4,318 > t_{tabel}$ 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebanyak 0,551. Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa. Walaupun sistem dan prosedur pengadaan telah dioptimalkan dengan baik, efektif, transparan dan tepat waktu, tapi jika tidak ada tindak lanjut dan pemantauan atas kepatuhan peraturan dan prosedur pengadaan maka resiko terjadinya kecurangan bisa terjadi. Dalam *theory fraud triangle* satu faktor yang mempengaruhi kecurangan adalah peluang (*opportunity*). Peluang ini didasarkan atas keyakinan

pelaku kecurangan merasa tindakan tersebut tidak terdeteksi. Sistem dan prosedur pengadaan yang tidak ditindaklanjuti dan tidak dipantau akan memunculkan peluang untuk melakukan kecurangan.

Penelitian ini sependapat dengan Zulaikha (2016), Sartono (2006) yang menyatakan sistem dan prosedur pengadaan berdampak signifikan dengan arah hubungannya positif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil studi variabel sistem pengendalian intern berdampak negatif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan analisis regresi variabel sistem pengendalian intrn memiliki skor signifikansi 0,005 yang posisinya lebih rendah dari 0,05. Kemudian bisa dilihat pada skor t_{hitung} , sebesar $2,848 > t_{tabel}$ 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar -0,087. Artinya bilamana semakin efektif sistem pengendalian intern, maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan.

Sesuai dengan *theory fraud triangle* satu faktor yang mempengaruhi kecurangan adalah peluang (*opportunity*). Peluang ini faktor pemicu yang didasarkan atas keyakinan pelaku kecurangan yang merasa tindakan tersebut tidak terdeteksi. Ketika peluang muncul, lemahnya sistem pengendalian intern, maka pelaku yang awalnya tidak berniat melakukan kecurangan justru akan melakukannya. Adanya sistem pengendalian intern dalam organisasi dipercaya bermanfaat dalam pencegahan *fraud*. Jika pengendalian intern suatu organisasi tinggi dan efektif maka akan mengurangi tindak kecurangan itu sendiri. Sebaliknya dengan jika sistem pengendalian intern lemah maka kecenderungan kecurangan pasti meningkat. Untuk mewujudkan pengendalian intern yang efektif, pemimpin instansi pemerintah diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara ke kondusifan di lingkungan kerjanya yang akan memotivasi pegawainya untuk

memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, serta harus melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Rencana, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan Ratnayani (2014), Hidayati (2017), dan Gayatri (2017) yang menyatakan jika sistem pengendalian intern berdampak negatif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian variabel kualitas panitia pengadaan berdampak positif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan analisis regresi variabel kualitas panitia pengadaan memiliki skor signifikansi 0,034 yang posisinya lebih rendah dari 0,05. Kemudian dapat dilihat pada skor t_{hitung} , sebesar $2,139 > t_{tabel}$ 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar 0,351. Panitia pengadaan ialah satu dari sekian peserta dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dan kegiatan serta keputusannya sangat menentukan proses pengadaan. Kualitas panitia yang dimaksud merupakan kondisi dimana panitia mampu menempatkan dirinya secara profesional dalam konteks yang berhubungan langsung dengan produk, jasa, manusia, dan lingkungannya. Sesuai dengan *theory fraud triangle* satu faktor yang mempengaruhi kecurangan adalah rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi ini didasarkan atas pembenaran apapun tindakan pelaku. Dalam hal ini biasanya pelaku yakin tindakan kecurangan yang ditimbulkan adalah bukan kecurangan melainkan memang haknya karena telah banyak berbuat jasa dalam organisasi tersebut. Dimana panitia tersebut memiliki kualitas diri yang tinggi dan disertai dengan karakter yang tidak baik dan tidak menempatkan diri maka kecurangan bisa saja terjadi. Karena panitia merasa dirinya sudah memberikan kualitas yang dia punya untuk berjalannya proses pengadaan barang/jasa tersebut. Maka dari itu pelaku menganggap perbuatannya sebagai perbuatan yang rasional saja.

Studi ini memiliki hasil yang sama dengan Zulaikha (2016), Hidayati (2017) yang menyatakan kualitas panitia pengadaan berdampak signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa.

Pengaruh Etika Pengadaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil penelitian variabel etika pengadaan berdampak negatif dan substansial mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan analisis regresi variabel etika pengadaan memiliki skor signifikansi 0,038 yang posisinya lebih rendah dari 0,05. Kemudian bisa terlihat pada skor t_{hitung} , sebesar $2,101 > t_{tabel}$ 1,65765. Skor koefisien regresi variabel ini sebesar -0,220. Hal ini berarti semakin baik dan beretika panitia pengadaan maka tingkat kecurangan akan menurun.

Etika pengadaan barang atau jasa ialah satu dari sekian aspek penting yang untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang sangat sehat dan berkeadilan. Etika yang baik akan memberikan pencegahan untuk tidak menyalahgunakan wewenang atau kolusi bagi keuntungannya sendiri. Sesuai dengan *theory fraud triangle* satu faktor yang mempengaruhi kecurangan adalah rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi ini didasarkan atas pembenaran apapun tindakan pelaku. Dalam hal ini biasanya pelaku yakin tindakan kecurangan yang ditimbulkan adalah bukan kecurangan melainkan memang haknya karena telah banyak berbuat jasa dalam organisasi tersebut. Dimana hal yang mempengaruhi munculnya rasionalisasi ini dilihat dari keperibadian, jika ada panitia dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki etika yang kurang maka pengadaan barang/jasa bisa dikatakan tidak sehat dan bisa menjurus ke terjadinya tindakan korupsi. Maka dari itu etika pengadaan yang baik sangat perlu diperhatikan untuk menekan tindak kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan Hidayati (2017), Herlina (2017), Setiawan (2020) dan Indah (2020) yang memutuskan etika pengadaan berdampak negatif

mengenai *fraud* pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui pembahasan diatas maka dapat ditentukan sebuah kesimpulan dari studi ini yaitu:

1. Penghasilan panitia berdampak negatif mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Hal ini berarti semakin rendah penghasilan panitia yang diterima maka akan semakin tinggi kecenderungan kecurangan pada pengadaan barang/jasa.
2. Sistem dan prosedur pengadaan berdampak positif mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Sistem dan prosedur pengadaan yang tidak ditindaklanjuti dan tidak dipantau akan memunculkan peluang untuk melakukan kecurangan.
3. Sistem pengendalian internal berdampak negatif mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Semakin efektif sistem pengendalian intern, maka akan berdampak semakin rendahnya kecenderungan kecurangan yang terjadi.
4. Kualitas panitia pengadaan berdampak positif mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Jika pelaku tersebut memiliki kualitas diri yang tinggi dan disertai dengan kesombongan dan tidak menempatkan diri maka kecurangan bisa saja terjadi dan pelaku menganggap perbuatannya sebagai perbuatan yang rasional saja.
5. Etika pengadaan berpengaruh negatif mengenai kecenderungan kecurangan pengadaan barang/jasa. Hal ini berarti semakin baik dan beretika panitia pengadaan maka tingkat kecurangan akan menurun.

Saran

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas adapun saran yang memiliki keterkaitan dengan studi ini yaitu:

1. Bagi SKPD di Kabupaten Buleleng agar meningkatkan kualitas SDM panitia pengadaan barang/jasa agar

lebih maksimal dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan transparan, ketentuan dan permintaan dalam pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan permintaan.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian, dan dapat menambahkan variabel lain seperti asimetri informasi, budaya organisasi, penegakan hukum, dan lainnya, serta memodifikasi metode yang digunakan, agar tidak hanya menggunakan metode *survey* berupa kuesioner, tetapi juga melakukan wawancara untuk hasil penelitian yang lebih *aktual* dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji. T. W. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Kajian Empiris di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Gayatri, Nurita. 2017. "Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Organisasi (Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Publik Di Kabupaten Buleleng)". *e-Journal S1 Ak*. Vol. 8. No. 2.
- Herlina, Tri. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Hidayati, Nur. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. Vol. 4. No. 2.
- Indah, Permata. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Desa". *e-Jurnal Akuntansi*.
- Infokorupsi, 2010. Polres Buleleng Tangani 10 Kepala Desa yang Tersandung Korupsi. Diakses pada <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6718&l=polres-buleleng-tangani-10-kepala-desa-yang-tersandung->. Diakses tanggal 6 Juli 2020.
- Metrobali, 2015, Kejati Bali Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Undiksha. Diakses pada <http://metroballi.com/kejati-bali-tahan-tersangka-korupsi-pembangunan-undiksha/>. Diakses tanggal 6 Juli 2020.
- Nashirotn, Nisa. 2017. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 18. No. 2.
- Nurani, Jatiningtyas. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintahan Di Wilayah Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nusabali, 2017. Tiga Pejabat Dinas Kelautan Ditahan. Diakses pada <http://www.nusabali.com/berita/21750/tiga-pejabat-dinas-kelautan-ditahan>. Diakses tanggal 6 Juli 2020.
- Ratnayani, Ayu. 2014. "Pengaruh Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi Good Governance Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada SKPD Di kabupaten Buleleng)". *e-Journal S1 Ak*. Vol. 2. No. 1.
- Rencana. 2016. "Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1. No. 1.
- Sartono. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan Pengadaan Barang atau jasa*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Setiawan, Budi. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Kabupaten Buleleng)". *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 9. No. 1.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suharti, dkk. 2015. *Jurnal Pengadaan*. Vol. 3. No. 3

Tempo, 2008, Mantan Kepala Dinas PU Buleleng Resmi Jadi Tersangka Korupsi. Diakses pada <http://nasional.tempo.co/read/130142/mantan-kepala-dinas-pu-buleleng-resmi-jadi-tersangka-korupsi>. Diakses tanggal 7 Juli 2020.

Zulaikha. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement *Fraud*: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 13. No. 2.